



**Laporan Penelitian Individu  
Untuk Penyusunan RPJP  
Kabupaten Mentawai**

**Tim Siberut**

**Oleh:**

**M. Zamzam Fauzanafi**

## **1. Gambaran Umum Kondisi Daerah (Kondisi Kekinian)**

### **a. Aspek Fisik-Geografi (Geo-morfologi; Kebencanaan ; Pola Perubahan Fisik Geografis**

Siberut adalah pulau terbesar dari 4 pulau utama di kepulauan Mentawai. Pulau ini berada sekitar 100 km dari pantai barat Sumatera . Tiga pulau utama yang lain; Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan, berjejer di sebelah selatan Siberut. Pulau-pulau ini lebih kecil dan lebih padat penduduknya.

Sebagian besar pulau Siberut adalah hutan, dan sebagian besar hutan dihuni dan dikuasai oleh manusia. Bagian dalam dari pulau Siberut berbukit meski tidak bergunung-gunung. Bagian tertinggi dari pulau ini, Teitei Batti, hanya berada diketinggian 384 meter dari permukaan laut. Bagian barat dari Siberut langsung terpotong dan berhadapan dengan Samudera Hindia. Sementara bagian timur lebih landai dan berhadapan dengan Teluk Mentawai. Di Bagian Barat lebih berupa hutan campuran dengan jurang terjal. Di sebelah Timur, hutan bercampur dengan rawa-rawa, tanaman sagu, dan hutan bakau. Di lembah antara perbukitan dan bagian dalam pulau, rata-rata curah hujan 4000 milimeters dengan tanpa perpanjangan musim kemarau sehingga mengairi ceruk dan mata air. Di sebelah timur, ceruk dan mata air ini mengairi sungai-sungai yang lebih besar, yang terus mengalir hingga dataran yang lebih rendah. Di Bagian selatan Siberut, sungai utama nya bernama Rereiket, yang bermuara di Teluk Mentawai di desa Muara Siberut, ibu kota Kecamatan Siberut Selatan.

Sungai dan daerah sekitar aliran sungai adalah aspek fisik-geografis yang penting di pulau Siberut. Secara tradisional orang mentawai membangun pemukiman di pinggiran sungai. Pola aliran sungai di Siberut membentuk pola aliran yang kompleks, seringkali terjadi erosi yang menyebabkan perkembangan bentang lahan yang terpotong-potong dan tidak rata dengan sungai dan aliran air. Di daerah bukit sungai membentuk semacam air terjun dan pada dataran rendah

sungai-sungai tersebut melebar dan berubah menjadi anak-anak sungai yang digunakan penduduk sebagai jalur transportasi air. Tercatat ada sekitar 28 batang sungai yang bermuara di pantai timur maupun barat.



Sungai-sungai besar di Siberut Selatan seperti Sereireket dan Silaoinan bukan hanya menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan desa atau pemukiman di hulu dan hilir atau muara, tetapi juga menjadi penanda bagi identitas kelompok kultural tertentu; misalnya perbedaan dialek dan adat sehari-hari. Di Siberut Selatan di kenal ada dialek Sereireket , Silaoinan, selain dialek lain, juga ritual penyembuhan dengan tatacara yang relatif berbeda juga. Nama sungai utama, seperti Sereireket juga sering dijadikan acuan dari mana seseorang berasal, ketika ditanya oleh orang lain, terutama sesama orang Mentawai. Tetapi ketika ditanya asal muasal oleh orang luar, mereka mengacu pada nama dusun atau desa.

Secara geologi Pulau Siberut tergolong muda dengan kondisi tanah yang lunak dan tidak mengandung bebatuan yang besar. Sehingga permukaan pulau menunjukkan banyak retakan. Kondisi tanah yang sedemikian rupa, juga yang disnyalir membuat jalan-jalan semen yang sudah dibangun cepat retak, rusak, dan amblas.



Dengan demikian, meskipun sudah ada beberapa ruas jalan semen yang dibangun , terutama di desa sekitar Ibukuta Kecamatan Siberut Selatan, seperti Maileppet dan Muara Siberut, sungai tetap menjadi jalur transportasi yang penting yang menghubungkan desa ibukota kecamatan, seperti Muara Siberut dengan desa-desa yang jauh di hulu.

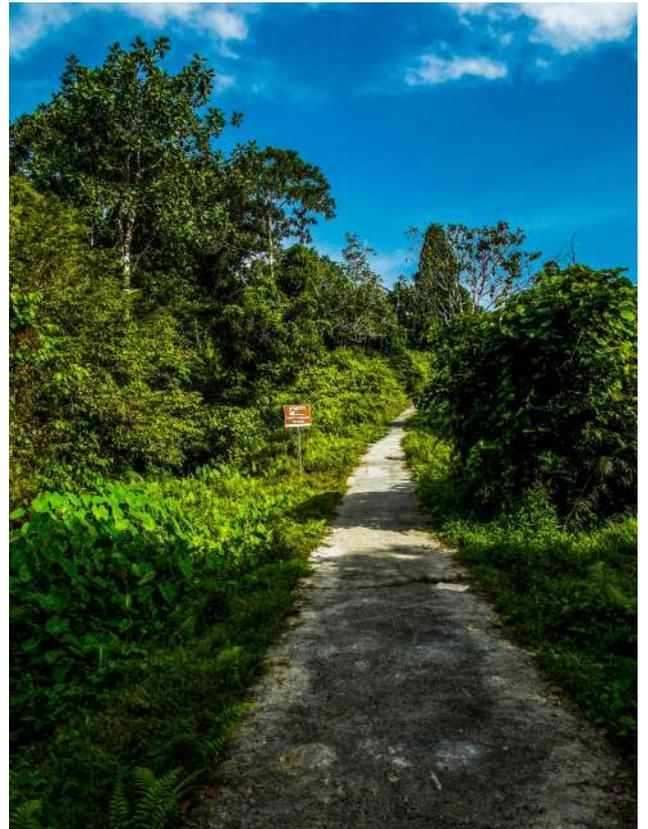
Penempatan pemukiman di sepanjang aliran sungai ini beresiko untuk terkena ancaman banjir. Dalam satu tahun, beberapa desa atau pemukiman langganan tergenang banjir. Salah satu banjir yang paling besar terjadi pada bulan April 2013 yang mengakibatkan beberapa kampung di desa Muntei, misal desa Salappa, dan Muara Sieberut terendam (misal Puro).



Kondisi daratan yang lebih landai di sekitar muara, memungkinkan berkembangnya pemukiman lebih padat (Muara Siberut). Kedekatan dengan bibir pantai juga memungkinkan untuk dibangun dermaga (Maileppet) yang menjadi pusat penghubung antar pulau di Mentawai dengan dataran yang lebih luas di Sumatera.



Namun, dari segi aspek kebencanaan, daerah sekitar muara ini lebih rentan terkena ancaman Sunami. Pengalaman gempa dan sunami yang pernah melanda Mentawai, membuat masyarakat sekitar Siberut lebih siaga. Sehingga mereka mencoba membangun jalur-jalur evakuasi ke arah perbukitan, dan menyiapkan hunian sementara di atas bukit-bukit tersebut.



Pada kejadian gempa-gempa dan ancaman Sunami beberapa tahun lalu, masyarakat sekitar muara dan bibir pantai segera mengevakuasi diri ke perbukitan. Warga Muara Siberut, Maileppet, juga sebagian Muntey, bahkan tinggal hampir 1 bulan di hunian sementara yang mereka bangun sendiri di bukit-bukit . Hingga saat ini hunian sementara yang diprakarsai oleh pemerintah belum selesai dibangun. Dan, kedepan mungkin bisa jadi persoalan, karena di didirikan di atas tanah yang termasuk wilayah taman nasional.

*“ Bagaimana bisa hidup tenang dan bekerja untuk cari uang, jika setiap kali ada gempa kami ketakutan , berlari, dan naik ke bukit tinggal ke sana..”* Kata Pak Anggelo, seorang kepala sekolah SD. *“Kami pernah tinggal sebulan di gubuk-gubuk di bukit, karena takut sunami. Biar tidak bosan, kami bawa penerangan dan TV...dulu awal-awal kami takut..mungkin kalau ada peringatan untuk naik*

ke bukit lagi, kami sudah tidak peduli..nggak enak hidup ketakutan terus” Kata Pak Marjuni, pekerja di pastoran di Muara Siberut.



**b. Aspek Ekologi (Penggunaan lahan/pola dan ruang hidup masyarakat; Penguasaan lahan; Tingkat pemenuhan kebutuhan; Pola-pola perubahan sosial – ekologi)**

Sebagian besar pulau Siberut berwujud hutan, yang semakin lama semakin berkurang. Sebagian besar hutan tersebut dihuni oleh manusia. Bahkan bisa dikatakan, hutan-hutan yang nampak tanpa penghunipun ada yang memiliki, menguasai, dan menggunakan. Mata orang luar mungkin akan mengira hutan, perdu, atau rawa-rawa sebagai wilayah kosong. Orang lokal, melihatnya sebagai wilayah yang sudah 'penuh' dengan penguasaan orang.



Masyarakat atau komunitas yang tinggal di sekitar hutan pada awalnya terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil (2-10 keluarga *indti/lalep*, 10-60 individu) membentuk unit sosial, ekonomi, politik dan kepemilikan tanah yang disebut Uma. Istilah Uma juga merujuk pada sebuah rumah besar (dibanding rumah lain) yang dijadikan tempat berkumpul dan melakukan ritual. Saat ini, sulit untuk menemukan kelompok pemukiman berdasarkan Uma. Sebagian besar pemukiman sudah mengelompok yang terdiri dari berbagai Uma. Dan kehadiran 'rumah besar' sebagai tempat ritual pun sudah nyaris punah. Pertemuan antar anggota uma atau pelaksanaan ritual saat ini seringkali diadakan di rumah orang yang dituakan, atau kepala uma (*sikebubbat uma*).

Saat ini konsentrasi tertinggi dari orang dan pemukiman berada di sepanjang pantai, di desa sekitar muara dari sungai besar (seperti desa Muara Siberut), dan di daerah hulu sungai, di desa-desa yang dibangun oleh pemerintah pada sekitar tahun 70-an sebagai bagian dari program modernisasi yang disebut sebagai program PKMT (Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing). Pendatang dari dataran Sumatera (Minang, Batak), Jawa, Nias, dll, bermukim di sekitar muara, yang juga menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan. Konsentrasi penduduk yang lebih rendah berada di sepanjang aliran sungai yang lebih kecil dan di sekitar hutan di antara dua sungai besar. Sehingga, dari pantai menuju pedalaman, kepadatan penduduk semakin menurun, dan area di pusat dari pulau Siberut tidak dihuni.

Pola penguasaan dan pengelolaan lahan atau tanah di pulau Siberut dan di Mentawai pada umumnya sangat kompleks dan semakin kompleks ketika program-program pembangunan dan sentuhan ekonomi pasar berkelindan dengannya.

Tanah di Siberut secara tradisional dimiliki secara komunal oleh anggota dari uma (klan). Secara historis bagi orang Mentawai juga tidak ada tanah yang kosong atau tanah yang dikuasai oleh pemerintah atau pendatang (*sasareu*). Individu sebagai anggota uma tidak bisa memiliki lahan, tetapi berhak untuk

menggunakannya. Individu anggota uma bisa menggunakan tanah milik uma dengan bebas dan secara teknis tanpa perlu meminta izin dari anggota uma yang lain. Hal ini terjadi karena secara praktik, setiap anggota uma tahu anggota uma yang lain; tahu apa yang mereka rencanakan dan lakukan pada tanah mereka. Izin, dalam hal ini, diberikan secara implisit.

Individu juga tidak bisa memiliki tanah milik uma lain, tetapi ia juga bisa menggunakan tanah milik uma lain dengan meminta izin terlebih dahulu, atau bisa menggunakan lahan tersebut karena proses pertukaran, terutama karena pernikahan, dan semacam denda (*tulo*), jika anggota uma tertentu dianggap melanggar ketentuan adat tertentu. Berdasarkan kepemilikan tanah ini, maka dikenal dua jenis uma yaitu uma pemilik tanah (*Sibakkat Laggai*) dan uma yang mendapat hak menjaga atau mengelola tanah milik uma lain (*Sipasijago*). Secara umum, tanah digunakan oleh anggota uma untuk bermukim (membangun rumah), bercocok tanam (berladang, berkebun dan di beberapa tempat sekarang mulai ada yang membuka sawah), memelihara ternak (Babi, ayam, bebek). Ketika program-program pembangunan dari pemerintah datang, tanah-tanah ini juga diminta untuk dibangun jalan, sekolah, perumahan, dll, yang pada perkembangannya memicu konflik yang rumit.

Secara tradisional, batas-batas lahan ditandai dengan tanda-tanda alam seperti bukit, pohon tua, batu, sungai, dll. Namun, seiring waktu dan ketika tanah semakin bernilai ekonomis, mulai ada upaya sertifikasi tanah dengan ukuran batas – batas melalui proses pengukuran, terutama di area yang tanah-tanah mulai diperjualbelikan dengan pendaatang.

Namun, hingga saat ini, klaim atau bukti-bukti kepemilikan tanah oleh uma tertentu, lebih didasarkan pada cerita turun temurun tentang asal muasal uma (pola kekerabatan dan keturunan) , perpecahan, dan migrasi/perbindahan antar uma. Perpecahan dalam uma terjadi terutama karena relasi di dalam uma yang bersifat ambigu; di satu sisi setiap keluarga, anggota uma (*lalep*), diwajibkan untuk menjaga solidaritasnya, tetapi di sisi lain, relasi itu juga bersifat egaliter dan

tanpa ada hirarki politik. Kepala uma, atau yang dituakan di uma, tidak mempunyai kekuatan politis dalam menentukan keputusan. Ia, lebih sering berfungsi dalam acara-acara ritual. Kondisi seperti ini membuat lalep secara terus menerus berayun-ayun dalam relasi harmonis dan ketegangan konflik di antara mereka, sehingga konflik ini seringkali tidak bisa dikelola, terutama ketika jumlah lalep terlalu banyak. Jalan keluar dari konflik di dalam uma ini seringkali adalah pemisahan diri (patuituai) dari uma asal, penggabungan dengan uma lain, atau pemisahan lagi. Sebagai unit sosial dan politik, uma, sebagaimana organisasi sosial tribal lainnya di berbagai belahan bumi, lebih sering bekerja atas dasar 'disensus' daripada 'konsensus'. Uma yang memisahkan diri seringkali membuat nama baru bagi uma mereka. Namun, ada juga yang tetap menggunakan nama uma asal. Uma-uma hasil pecahan dengan nama yang sama disebut oleh para ahli sebagai faksi uma.

Perpecahan dan penggabungan uma ini membuat pola kepemilikan lahan semakin rumit dan sarat konflik. Ketika anggota uma memisahkan diri dengan uma lama, mereka harus pindah secara fisik ke lahan yang lain. Biasanya mereka akan tinggal dan menggunakan lahan milik uma lain, tentu saja dengan izin dan persetujuan dari uma sipemilik tanah. Maka dalam satu unit pemukiman bisa terdiri dari berbagai uma yang terdiri dari uma pemilik tanah dan uma yang mendapatkan izin untuk tinggal dan mengelola tanah tersebut. Karena perpecahan, migrasi, perkawinan, jaringan kekerabatan dan persekutuan, satu uma kemudian menetap di lembah-lembah sungai dan hidup berdampingan dengan uma lain dan membentuk jaringan kekerabatan, ketegangan, dan pemukiman yang kompleks (meski secara visual dan spasial nampak sederhana) sepanjang lembah dan garis pantai.

Pola penguasaan dan kepemilikan lahan dan ruang hidup masyarakat Siberut pada khususnya dan Mentawai pada umumnya, berubah semakin kompleks semenjak diselenggarakan program PKMT (Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing). Sebelumnya, pada tahun 1970-an, ada program yang serupa yang mengawali PKMT, program yang dijalankan oleh badan administrasi khusus yang

diberi nama Otoritas Pengembangan Kepulauan Mentawai (OPKM). Program utama yang mereka jalankan adalah pembentukan pemukiman baru di Malancan, Maileppet, Mentei, Simaledi, dan Siirilogui. Melalui program ini disediakan rumah seragam berukuran 25 – 30 meter persegi bagi keluarga yang mau tinggal di pemukiman dari pada tinggal secara terpisah-pisah di sekitar hutan bersama uma mereka. Keluarga yang pindah ke pemukiman baru ini juga dilarang memelihara babi mereka. Selain mengenalkan pola pemukiman seragam yang terpusat, melalui program ini juga diperkenalkan pertanian sawah. Program ini hanya bertahan selama 5 tahun.

PKMT, sesuai dengan namanya berjalan atas dasar pemikiran bahwa orang Mentawai adalah ‘masyarakat terasing’ yang perlu ‘disejahterakan’. Pengertian ‘masyarakat terasing’ sering disematkan pada komunitas atau kelompok orang yang cara hidup mereka tidak sesuai dengan standar nasional; memeluk agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah (menghapus agama lokal, dalam kasus orang Mentawai adalah ‘*arat sabulungan*’), pendidikan wajib, penguasaan bahasa Indonesia, integrasi pada ekonomi pasar, dan rekognisi untuk otoritas negara. Semua ini bisa dicapai, menurut program ini, dengan cara memindahkan orang mentawai dari des tradisional mereka/pullagajat ke pemukiman seragam, standar, dan terpusat. Pemukiman baru ini sering disebut sebagai ‘*barasi*’ yang dalam bahasa Minang artinya bersih. Di mana di tempat baru ini juga mereka tidak bisa memelihara babi. Larangan ini ikut membantu menghilangkan agama lokal mereka ‘*arab sabulungan*’.

Seperti yang sudah diungkap di atas, ide dan praktik orang Mentawai berpindah dan memiliki rumah yang baru bukanlah hal yang baru. Secara tradisional mereka sudah melakukan itu. Lewat PKMT ini, bedanya mereka harus ‘terus tinggal’ di rumah yang disediakan pemerintah ini. Jadi PKMT bukan semata-mata membangun desa baru, tetapi kebijakan agar mereka tetap tinggal di desa baru itu. Untuk itu, pemerintah memberikan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka selama 3 tahun. Tentu saja dengan uang ini juga ikut merubah pola hidup mereka yang lebih terintegrasi dengan jual-beli dengan

mekanisme pasar, dan bukan lagi resiprositas dan pertukaran dalam konteks 'ekonomi hadiah' yang tidak bersifat kalkulatif dan kuantitatif. Mereka diupayakan untuk bisa memproduksi barang untuk dijual di pasar, membeli barang kebutuhan sehari-hari di toko atau warung, dan ini berarti memangkas waktu mereka untuk memproduksi barang yang dibutuhkan untuk pertukaran dan seremoni.

Meski dengan alasan untuk mensejahterakan masyarakat Mentawai yang 'terbelakang' dengan memudahkan mereka untuk mengakses layanan pemerintah; seperti pendidikan, sekolah, pasar, dan sarana ibadah agama resmi, program ini telah memicu perubahan sosial yang menimbulkan banyak persoalan di kemudian hari. Selain pola produksi yang berubah, seperti yang diungkap di atas, yang lebih berorientasi pada budidaya tanaman komersial, mendatangkan penyakit, menimbulkan kesulitan ekonomi, dan membuat masyarakat lebih konsumtif, salah satu perubahan yang paling penting tentu saja berhubungan dengan perubahan pola kepemilikan dan tata guna lahan.

Mengenai kepemilikan lahan, pemukiman PKMT, karena secara tradisional di Siberut semua tanah ada pemilikinya yaitu uma tertentu, didirikan di tanah milik uma tertentu. Cara pemerintah mendapatkan tanah ini adalah dengan 'membujuk' uma pemilik tanah untuk 'menghibahkan' tanah mereka demi kemajuan pembangunan bersama. *"Toh nanti kalau sudah ada jalan, sekolah, pasar, dll..yang menikmati juga kita"* kata-kata seperti itu yang sering dilontarkan penduduk yang kini tinggal di pemukiman pembentukan PKMT di dusun Puro, desa Muara Siiberut ketika bercerita proses pengalihan tanah tersebut. Pada kasus pembangunan pemukiman PKMT di Puro, pada awalnya uma pemilik tanah tidak bermasalah ketika harus menghibahkan tanah mereka. Maka tinggallah berbagai uma di perumahan yang pada awalnya juga dikelompokkan berdasarkan uma-uma asal mereka. Persoalan muncul akhir-akhir ini, ketika ada upaya untuk pengkiaiaman kembali dari sebuah uma yang menyatakan diri sebagai pemilik lahan pemukiman PKMT tersebut. Uma ini menuntut ganti rugi uang atas penggunaan lahan tersebut. Hal ini dipicu dengan semakin banyaknya orang yang



sibulangan adalah animatisme, yang menganggap segala sesuatu mempunyai roh, termasuk pohon, baru, dll) menjadi 'dipenuhsesaki oleh manusia' . Tidak mengherankan apabila hubungan antar manusia ini tidak akur, sebab ia merubah pertukaran yang akan meminimlalsisi konflik dengan memadatkan ruang antar uma.

Ruang di barasi (perkampungan baru hasil PKMT) dan pulaggajat (pemukiman tradisional) secara fundamental berbeda. Secara tradisional, setiap uma biasanya dipisahkan oleh hutan yang cukup luas dan jauh (leleu) di mana para roh bermukim (sanitu). Pertukaran yang berjalan melintas hutan dari satu uma ke uma lain membentuk keserupaan antar uma dan dengan para roh yang harus di kelola agar tidak terjadi konflik. Ketika konflik tidak bisa dimitigasi ruang yang terbentang jauh memungkinkan persaingan terbuka antar uma (pako) tidak menjadi kekerasan. Di barasi tidak ada lagi ruang antara uma. Secara harfiah mereka benar-benar tinggal berdampingan. Hidup di ruang yang sama , mereka menjadi serupa, hal ini menciptakan konflik yang tidak bisa lagi di mitigasi dengan ruang atau pertukaran. Di barasi, konflik sulit untuk diselesaikan kecuali dimediasi oleh pihak ke tiga. Negara sering berfungsi sebagai pihak ketiga ini.

Selain itu, dengan memisahkan orang dengan ternak (babi, ayam, dll) mereka dan menempatkan orang lebih dekat dengan toko, warung, atau pasar, seperti yang dilakukan di barasi, telah mengalihkan 'kerja produktif' dengan produksi dan pertukaran barang antar uma menjadi produksi dan pertukaran dengan pedagang. Dengan diberi uang jatah hidup selama 3 tahun, menyebabkan warga yang tinggal di barasi lebih konsumtif daripada produktif. Ketika uang ini habis, beberapa dari mereka kembali ke pulaggajat mereka di hulu, atau membuat pemukiman baru. *"Di barasi tidak ada yang bisa dilakukan, dan di sini juga panas"* kata mereka. Namun, sepertinya, mereka sudah terlanjur masuk ke dalam bentuk pertukaran baru dan produksi ekonomi baru, bukan lagi pertukaran antar uma.

Pada kasus lain, seperti kasus dusun Limu, uma atau orang dari uma tertentu yang memilih pindah dari barasi (pemukiman PMKT) bukan ke pemukiman asal

mereka, tetapi juga ke pemukiman baru, di mana di sana sudah tinggal uma tertentu yang jadi pemilik lahan. Kondisi ini juga menimbulkan konflik baru.

Di desa Saliguma terdapat dusun bernama Limu, yang dibuka menjadi pemukiman sekitar tahun 1964 oleh para pekerja perusahaan HPH PT CPPS untuk kepentingan penebangan kayu. Tahun 1982, seiring dengan dibangunnya pemukiman PKMT di desa Saliguma, para penduduk Limu seharusnya pindah ke Saliguma. Tetapi mereka menolak, karena merasa akses ke ladang dan ternak mereka terlalu jauh. Pemerintah saat itu mengabulkan penolakan mereka, karena sebagai pemukiman Limu juga sudah sedikit banyak masuk standar pemerintah. Sehingga ia memberi opsi pada uma-uma yang berada di sekitar wilayah tersebut untuk pindah ke desa PKMT; Saliguma atau ke Limu. Menurut cerita, dan juga terjadi pada proses pemindahan warga ke pemukiman PKMT yang lain, proses pemindahan ini sering diikuti dengan todongan senjata dari polisi dan tentara.

Kepala dusun yang dipilih di Limu adalah orang yang dituakan di uma pemilik lahan di Limu, namanya Sarereake. Kemudian pada tahun 2000 an datanglah seseorang dari uma Sagulu yang meninggalkan pemukiman PKMT di Puro . Dia kemudian mengajak keluarganya, termasuk adik-adiknya, dan bekerja sebagai guru SD di Limu. Karena kecakapannya kemudian dia terpilih menjadi kepala dusun menggantikan kepala dusun lama yang berasal dari uma pemilik lahan. Selama menjadi kepala dusun, hubungan dia dengan uma pemilik lahan memang agak renggang. Suatu hari ada isu beredar bahwa akan ada pembangunan jalan dari dinas pekerjaan umum (PU). Pada suatu kesempatan di gereja dia membuat pertemuan untuk membahas isu pembangunan jalan tersebut. Pada pertemuan itu dia bertanya pada uma pemilik tanah mengenai kesiapan dan kesanggupan mereka 'memberikan tanah' untuk pembangunan jalan tersebut. Pertanyaan tersebut memancing kemarahan uma pemilik tanah. Karena mereka merasa dirongrong. Kemarahan ini juga bisa terjadi karena akumulasi konflik dan ketidakdekatan si kepala dusun dengan uma pemilik tanah., yang merasa terpinggirkan. Ada pula yang berpendapat kemarahan itu juga muncul karena

kesalahfahaman, ketika si kepala dusun menggunakan bahasa Indonesia yang diajarkan oleh orang-orang yang bisa tidak terlalu dimengerti dan disalahartikan oleh umah pemilik tanah. Namun, kemungkinan lain yang sangat masuk akal adalah umah pemilik tanah takut kejadian di Puro terulang. Ketika mereka menghibahkan tanah mereka untuk pembangunan infrastruktur, tanah mereka malah dikuasai pendatang dan dijual.

Pada kesempatan itu tetua dari umah pemilik lahan berkata, kurang lenih demikian; *“kalau kalian tidak suka silahkan pergi dari Limu”*. Pernyataan pengusiran ini ternyata ditanggapi serius oleh si kepala dusun dan umahnya. Kebetulan umah pendatang yang lain yang juga tinggal di Limu, umah Sabangan, mempunyai rencana untuk pindah ke lahan milik mereka sendiri di daerah yang bernama Gotab, yang masih berada dalam satu wilayah desa. Karena masuknya beberapa orang, umah Sabangan ini merasa apabila mereka tinggal di Gotab, mereka akan lebih berkembang dan sejahtera.

Akhirnya di kepala dusun dengan umahnya pindah ke Gotab bersama umah Sabangan yang pemilik tanah Gotab. Ketika proses pembukaan lahan dan pembuatan pemukiman, mereka mulai enggan untuk mengambil hasil ladang mereka yang masih berada di wilayah Limu. Selain itu, anak-anak mereka pun mulai enggan sekolah. Hingga hampir setengah tahun mereka tidak sekolah. Kemudian dengan bernegosiasi dengan pihak gereja, akhirnya dibukalah kelompok belajar di Gotab, dan si eks kepala dusun Limu menjadi gurunya.

Pada tahun 2006, orang-orang di Gotab mengajukan proposal pengembangan pemukiman ke dinas sosial. Proposal mereka disetujui. Maka dibangunlah rumah-rumah mereka dengan standar yang lebih baik. Selain sekolah mereka pun berkembang menjadi filial dari sekolah Santa Maria.

Kondisi kemudian berbalik. Umah Sarereake di Limu pun pecah, dan sebagian ikut pindah ke Gotab. Di Limu sekarang hanya menyisakan 9 keluarga saja. Sekolah di Limu yang sudah sampai kelas lima juga ditutup karena kekurangan murid. 9

keluarga yang tinggal di Limu berasal dari sisa uma Sarereake dan Uma Salaise, yang hanya 3 KK. Uma Salaise ini tidak memiliki hubungan atau aliansi yang bagus dan erat dengan uma lain selain dengan uma yang ada di Limu, sehingga mereka memilih tetap tinggal.

Dari kasus di Limu dan Gotab ini, bisa kita lihat bagaimana pasca PKMT, pola pengelolaan dan kepemilikan tanah di luar PKMT pun menjadi lebih rumit dan kompleks. Proyek-proyek pembangunan, seperti jalan dan infrastruktur lain, meski sekarang sering dibatalkan sangat dibutuhkan masyarakat, lebih banyak berakhir dengan konflik, dan perpecahan antar Uma, dari pada pertukaran yang menciptakan keselarasan.

### **c. Aspek Sosial Budaya (Demografi; SDM; Pengorganisasi sosial masy; Nilai lokalitas; Solidaritas sosial)**

Dari pemaparan mengenai aspek ekologis, terutama pengelolaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya, bisa dilihat bagaimana pola penguasaan sumber daya tersebut berhubungan dengan aspek sosial budaya masyarakat Siberut. Uma sebagai unit sosial, ekonomi, politik, masih berperan penting, terutama ketika menyangkut klaim kepemilikan lahan. Ketika tanah dan lahan semakin menjadi komoditas pada sistem ekonomi pasar, dan menjadi rebutan untuk dialih 'pembangunan', masyarakat Siberut masih bersandar pada uma sebagai satu-satunya sumber klaim kepemilikan tanah.

Namun, sebagai organisasi sosial yang bersifat ambigu; dalam satu harus menjaga solidaritas, sekaligus di sisi lain sangat egaliter dengan tanpa hirarki dan penentu keputusan yang cukup otoritatif, maka pengorganisasian sosial berbasis uma lebih banyak menghasilkan disensus dari pada konsensus. Perpecahan dan migrasi uma ke tempat lain, ketika lahan masih banyak tersedia, dan ada ruang antara mereka, masih bisa memitigasi konflik melalui sistem pertukaran di antara mereka.

Namun, pasca PKMT yang telah merubah relasi antar uma, memunculkan pihak ketiga yang memediasi konflik, dalam hal ini biasanya perangkat negara.

Namun, para mediator ini juga (sipatalaga) harus mempunyai legitimasi dan modal tertentu. Modal utamanya adalah pengetahuan dia mengenai sejarah asal-usul uma, kekerebatan, persatuan, perpecahan, dan perpindahan uma. Karena pengetahuan ini menjadi sumber legitimasi utama dalam kepemilikan tanah. Tidak cukup hanya pengetahuan mengenai sejarah asal-usul uma, dia juga harus mempunyai kemampuan berbahasa yang tepat dalam mengantarkan pengetahuan dia. Jika tidak, maka perundingan bisa berakhir dengan konflik baru, atau perpecahan. Seperti yang telah diungkap dalam kasus Limu di atas. Penggunaan bahasa Indonesia kadang bisa menimbulkan persoalan juga.

*“Dia harus bisa mengutarakan pendapat, temuan, dengan kata-kata dan bahasa yang tepat..jangan sampai keluar kata-kata yang dirasa mengancam. Karena mengancam berarti membuat hidup orang tidak tenang, terteror, dan ia bisa didenda. Ia harus bisa berkata keras tanpa mengancam...disini mengancam akan membunuh orang dendanya disamakan dengan orang yang membunuh”*

Menurut salah satu informan yang sudah berkali-kali terlibat dalam pertikaian soal kepemilikan tanah.

Kemampuan tersebut biasanya berada pada sosok yang punya hubungan dan akar secara tradisional dengan para tetua uma. Karena cerita-cerita itu biasanya diwariskan secara lisan oleh para tetua uma., namun saat bersamaan dia punya hubungan atau dia sendiri adalah ‘perangkat negara’, misal kepala desa, kepala dusun. Salah satu yang memenuhi profil ini, adalah mantan kepala desa Muntei; Pak Viktor. Dia sudah berkali-kali menjadi mediator dan juga narasumber untuk konflik tanah di daerah Siberut yang melibatkan berbagai uma. Menurut beberapa orang, dia sendiri bisa mendapatkan keuntungan dari perannya, dengan sering mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah melalui PNPM , P2d, dan proyek lain. Karena melibatkan ‘tokoh’ seperti ini juga seolah menjamin berjalannya proyek pembangunan, karena proyek pembangunan selalu berhubungan dengan pengadaan tanah, dan mobilisasi tenaga dan sumberdaya.

Pengetahuan dan kemampuan berbahasa dari si mediator ini, bukan mustahil adalah salah satu pengganti dari ruang antara uma yang dulu memungkinkan pertukaran dan menghindarkan pertikaian publik antar uma menjadi kekerasan. Hingga saat ini, menurut banyak orang yang diwawancarai, meski konflik tanah sangat intens di Siberut, atau di Mentawai pada umumnya, hampir tidak pernah menjadi konflik dengan kekerasan. Selain karena masyarakat pun masih mau mengikuti peraturan denda jika mereka memang terbukti mengancam, meneror, orang lain.

Ini adalah salah satu nilai lokalitas dan solidaritas sosial yang masih bisa berjalan dengan baik, dan dapat digunakan dalam upaya-upaya untuk menjalankan program program pembangunan untuk kesejahteraan orang Siberut dan Mentawai.

Mediator atau narasumber seperti Pak Viktor paling tidak juga mengenyam pendidikan sekolah, Dia sendiri lulus SMP. Tokoh-tokoh lain yang berperan seperti Pak Viktor di antaranya adalah; Pak Markus ( ia adalah ayah pak Viktor, dan juga mantan kepala desa Muntei) Pak Laban (Mantan kadus Puro sejak program PKMT), Siguluimata (seorang Sikerei /dukun, yang menguasai cerita sejarah asal-usul uma, ia biasa menjadi saksi dalam pertikaian soal tanah, dan ia juga uma pemilik lahan). Sementara itu tetua uma sendiri, tidak secara otomatis bisa memegang peran seperti ini, karena dia pun tidak punya otortas untuk menentukan keputusan bagi uma-nya. Tetua uma lebih sering berperan dalam urusan ritual bersama Sikerei.

Organisasi sosial lain yang memiliki pengaruh di Siberut, tentu saja adalah gereja. Namun, perhatian gereja terhadap persoalan di luar urusan keagamaan, sangat bergantung pada minat pastornya. Dari beberapa pastor yang pernah bertugas di Siberut ada yang memiliki perhatian khusus pada pendidikan, lingkungan, pengembangan pertanian, memebrikan beasiswa bagi anak-anak Siberut untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah.



Namun, ada pendapat menarik dari Kepala Desa Muntei ketika kami mengunjungi dusun-dusun yang terpencil di hulu sungai, seperti Bakellu, Salappak, dan Magosi. Ketika masyarakat mengeluh bahwa mereka tidak ada yang mendampingi atau mengajari cara bercocok tanam sayuran yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, saya bertanya: “gereja tidak mengajari?” dengan serempak warga Bakellu yang saat itu berkumpul di gereja berkata; “tidak !!!!”. Pak Kepala Desa kemudian menambahkan: “Setiap minggu kami ke gereja, mereka hanya mengurus ketuhanan, ya kami mengerti harus menyembah tuhan...tapi kami juga harus makan..dan mereka tidak melakukan apa-apa selai mengajak mengingat tuhan..”.

Pada satu kesempatan, Pak Kepala Desa Muntei juga berkata; “kami ini setengah masih arat sabilungan (agama lokal orang Mentawai), setengah bisa kristen, katolik, Islam atau Bahai (agama baru dari Iran)”. Yang kemudian ditimpali oleh beberapa orang dusun Salappak: “Kalau orang Islam mau menyediakan beasiswa atau menyekolahkan anak kami, kami masuk Islam. Kalau kristen begitu juga kami masuk kristen..”. Pendapat ini kluang lebih menunjukan bahwa agama lebih dilihat sebagai ‘institusi’ yang bisa memebrikan mereka akses pada ‘sumber daya’ atau ‘agama itu sendiri adalah sumber daya’.



Memang dalam kehidupan sehari-hari orang Siberut, meskipun ia memeluk agam Islam, Kristen, atau Katolik, mereka masih juga percaya bahwa setiap benda mempunyai roh, dan mereka harus hidup berdampingan dan melakukan pertukaran dengan roh-roh tersebut. Jika mereka akan menebang pohon, mereka akan meminta izin pada roh tersebut dan menyimpan rokok sebagai pertukaran dengan roh pohon tersebut. Jika mereka tidak melakukan ini, mereka percaya akan celaka. Selain itu, meski beberapa di antara mereka memeluk Islam, mereka masih tetap memelihara babi, karena babi selain untuk memenuhi kebutuhan protein, dan dijual, ia juga unsur penting dalam berbagai ritual, termasuk ritual penyembuhan yang dipimpin oleh *Sikerei*. *Sikerei* sebagai dukun atau penyembuh, secara umum berperan sebagai perantara antara dunia roh dan dunia manusia.

Organisasi keagamaan lain yang cukup mempunyai pengaruh di Siberut adalah Dewan Dakwah Islam (DDI). Sebagai mana gereja, mereka lebih fokus pada urusan keagamaan dengan melakukan dakwah, dan mencoba melakukan Islamiisasi di Siberut. Selain memberikan beasiswa untuk anak-anak Siberut yang mau masuk pesantren hingga ke Padang. Saat ini DDI tengah disibukan dengan pembangunan Islamic Centre yang berdiri megah di pinggir pantai Muara Siberut. Islamic Centre dengan fasilitas mesjid, pesantren, dan asrama ini didanai oleh

pemerintah Saudi Arabia. Beberapa orang tua dan anak senang dengan adanya Islamic Centre ini, karena mereka bisa mendapatkan pendidikan gratis nantinya.

Selain organisasi keagamaan, di setiap dusun di Siberut juga terdapat organisasi pemuda. Ada dua jenis organisasi pemuda; Karang taruna dan kelompok pemuda. Karang taruna biasanya adalah bentukan pemerintah dan dapat pendanaan dari pemerintah. Sementara kelompok pemuda, biasanya dibentuk oleh orang-orang di luar Karang taruna. Namun, kegiatan mereka masih terbatas penyelenggaraan kegiatan olah raga atau hiburan lain. Selain itu, tentu saja, ada organisasi kepemudaan yang dibentuk gereja. Kegiatan mereka juga sebatas kegiatan keagamaan.

Perkumpulan berbasis etnis dan agama, terutama pendatang, yang terus berjalan salah satunya adalah Perkumpulan Orang Jawa Katolik (Perjaka). Perkumpulan ini lebih berperan dalam urusan membantu pesta pernikahan, membantu anggotanya yang sakit, mengadakan arisan rutin, dan membantu keluarga yang anggotanya meninggal.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam pengorganisasian masyarakat. LSM yang hadir di Mentawai sebagian besar berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Hal ini disebabkan Pulau Siberut khususnya dikenal sebagai tempat bagi keragaman hayati dan endemik bagi jenis hewan-hewan tertentu, seperti monyet daun dll. Tercatat lembaga internasional seperti WWF Unesco, bergerak di bidang ini. Selain Walhi yang juga aktif dalam advokasi perlindungan hutan Siberut.

Perkumpulan Siberut Hijau (Pasih) adalah LSM yang didirikan oleh pendatang dari Jawa dan beberapa orang Mentawai yang sebelumnya terlibat dalam program Co-Management pengelolaan Taman Nasional Siberut yang bekerja sama dengan Unesco. Pasih juga berkontribusi dalam isu konservasi. Tetapi mereka tidak terlalu fokus pada advokasi, melainkan lebih pada penghijauan, pendataan sumber daya hutan, dan uji coba pengembangan tanaman-tanaman tertentu. Yoyok,

salah satu pendiri Pasih, mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah mulai putus asa dengan berbagai upaya yang dia lakukan untuk memperbaiki atau melindungi lingkungan Siberut. Selain, karena selalu berakhir dengan konflik dan kegagalan, warga Siberut, bahkan yang orang Mentawai asli pun mulai pragmatis, mereka, menurutnya, hanya peduli dengan kucuran dana proyek, baik dari LSM ataupun dari pemerintah. Tidak mengherankan, apabila Pasih pun sekarang ditinggal anggota-anggotanya, beberapa di antara mereka, yang orang Mentawai asli, dengan kemampuan yang dia dapat selama aktif di LSM dan karena hubungan dengan berbagai umma di sekitarnya, mulai ikut bersaing untuk mendapatkan tender-tender pembangunan jalan, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Mereka bisa bermain di antara otoritas tradisional, pemerintah, dan LSM.

Salah satu LSM yang identik dengan Mentawai, sehingga di Padang sering disebut sebagai “LSM-nya orang Mentawai” adalah Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM). Selain ikut serta dalam gerakan konservasi dan lingkungan. Hingga saat ini yang masih terus berjalan dari YCMM adalah penerbitan media massa, seperti koran, bernama: Puailiggoubat, yang memuat berita-berita terkini, dari mulai isu politik, ekonomi, lingkungan, korupsi, dll yang terjadi di Mentawai. Bisa dikatakan ini satu-satunya media massa cetak yang dimiliki Mentawai, yang dibaca orang hingga di pedalaman Siberut. Selain mereka juga mempunyai radio yang bisa menjangkau seluruh Mentawai. YCMM juga ikut membantu terbentuknya Dewan Adat di tingkat Kecamatan Siberut Selatan yang digunakan untuk menguatkan legitimasi akan tanah dalam kasus tuntutan beberapa umma terhadap dinas sosial atas penggunaan lahan dalam program PMKT. YCMM dan LSM lain ikut membantu dengan memberikan pelatihan para legal bagi masyarakat.

Selain itu, salah satu program YCMM yang masih berjalan dan dianggap sukses adalah pendirian ‘Sekolah Hutan’ untuk orang dusun Salappak dan Magosi yang termasuk ke dalam wilayah Desa Muntei, meski jaraknya jauh dari pusat Desa Muntei yang berada di dekat Muara Siberut. Tiga dusun; Bekellu, Salappak, dan Muntei, berada jauh di hulu, dan harus dijangkau dengan jalur sungai, dengan waktu tempuh sekitar 6-8 jam perjalanan. Bekellu dan Salappak adalah dusun yang

sudah terlebih dahulu terbentuk. Sementara Magosi adalah dusun baru, yang dibangun secara swadaya oleh beberapa kepala keluarga dari berbagai uma yang meninggalkan pemukiman PKMT di Saliguma dan Puro. Pada Awalnya, mereka membuka pemukiman masuk ke dalam hutan, lalu dengan alasan agar lebih mudah dijangkau oleh ‘palayanan pemerintah’ dan juga ‘pelayanan LSM’, dalam hal ini ‘sekolah hutan’ YCMM, mereka pindah mendekati bantaran sungai. Di Magosi ini lah YCMM mendirikan semacam kelompok belajar yang disebut sebagai ‘sekolah hutan’, yang sebelumnya juga sudah di lakukan di dusun sebelahnya Salappak. Saat ini, “Sekolah Hutan’ ini sudah terintegrasi dengan sekolah dasar yang meeruakan filial dari SD Santa Maria.



*“Kegiatan YCMM ini tidak fokus, macam-mavam dibuat. Jadi tidak tuntas. Ada pertanian, belim tuntas, ada penyuluhan hukum, terus pendidikan...jadi kami bisanya sedikit-sedkiti”* menurut kepala dusun Salappak yang kemudian diamini Kepala Desa Muntei.

Selain itu, menurut mereka untuk mengatasi itu, salah satunya dengan membentuk kelompok yang berbeda untuk program yang berbeda. Agar setiap kelompok bisa tuntas menguasai teknik pertanian, lalu kelompok lain punya kemampuan dalam urusan hukum, dll. Ketika ditanya apakah sebelum program dimulai diadakan identifikasi program apa dan cara pengorganisasian seperti apa yang cocok buat mereka, Kepala Desa Muntei berkata: *“ada , tapi kan sebenarnya program dan cara menjalankannya sudah disiapkan oleh mereka sebelumnya...kita kan tinggal mengikuti”* .

Saat ini, ada LSM baru yang membuat program mirip dengan YCMM, namanya; Yayasan Fajar Harapan. Mereka juga mengafakan program pendidikan untuk anak-anak, lalu mengajari ibu-ibu untuk menanam sayuran di sekitar rumah mereka untuk kebutuhan sehari-hari mereka, dan juga program makanan sehat untuk anak-anak. Pak Kadus Salappak menilai bahwa program Yayasan Fajar Harapan nampak lebih fokus dan didampingi sampai tuntas, katanya.

Di sini peran LSM dalam konteks ‘developmentalisme’ dipertanyakan, karena mereka tidak bisa , terutama, mengembangkan program yang menyangkut peningkatan ekonomi secara berkelanjutan, dan tentu juga tidak bisa membuat program menyangkut pembangunan infrastruktur seperti jalan. Rahmadi, salah satu pentolan YCMM, mengaku bahwa LSM tidak punya anggaran yang rutin dan berkesinambungan seperti pemerintah. Selain memang pekerjaan seperti membangun infratrstruktur bukan tugas mereka. LSM lebih banyak bertugas membuat inisiatif, percentohan, dan lebih ke advokasi. Selain ia juga mengakui bahwa apa yang mereka lakukan dibatasi oleh kerangka program itu sendiri. Mengenai yang terakhir, seperti diungkap di atas, kepala desa dan warganya, sepertinya mengerti. Lalu bagaimana tentang ‘pembangunan ekonomi’? bagaimana kondisi mereka dan apa yang mereka alami dan fahami?

**d. Aspek Ekonomi (Potensi Sumberdaya Alam; Sektoral; Aspek kesejahteraan masy/tingkat kemiskinan; Peta investasi dan daya saing daerah)**

Saat ini orang Siberut masih mengandalkan pengolahan lahan dengan cara berkebun untu memperoleh produk yang bisa dijual. Mereka menghasilkan pisang, kelapa (kopra), cengkeh, kakao, pala, dan buah-buahan (duren, cempedak, dll). Mereka juga mengambil hasil hutan seperti rotan, nilam, dan gaharu, untuk dijual. Sementara peternakan yang secara tradisional masih berjalan adalah babi, ayam, dan sapi khas Mentawai.

*“Kami di sini tidak bekerja, cuma mengisi waktu kosong saja...kalau bekerja seharusnya kita mendapat uang rutin dari hasil penjualan tanaman atau ternak kita, sekarang kan tidak”* kata Pak kades Muntei. Hal ini terjadi, terutama menurut dia karena infrastruktur berupa jalan belum bisa menunjang proses pemasaran hasil produksi mereka. *“Kalau sudah ada jalan, bukan kita yang mengantar ke Muara Sieberut, ke penampung atau dermaga, tapi para pedagang itu bisa ke sini mengambil ..dan harganya pun pasti bagus”* tambahnya.



Demikian tutur Kepala Desa Muntei dalam obrolan bersama masyarakat di Bekellu, Sallapak, dan Magosi. Berkali-kali dia berkata dan juga mempengaruhi warganya untuk menyebutkan bahwa yang paling penting buat mereka saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. Sehingga mereka bisa memasarkan hasil bumi seperti pisang, kakao, cengkeh, pinang, dll. Saat ini, untuk memasarkan hasil produksi mereka, mereka harus menggunakan pongpong (perahu), menelusuri sungai ke Muara Siberut, di mana para penampung berada. Biaya pengangkutan hasil bumi itu sekali jalan menggunakan satu pongpong, bisa memakan biaya paling tidak 300 ribu rupiah, karena harga BBM yang sangat mahal, karena langka atau ditimbun agen. Sesampainya di penampung mereka sudah tidak punya daya tawar. Penampung bisa menentukan harga seenaknya. Orang-orang Salappak, Bekelu, Magosi, dan orang hulu lain, mau tidak mau harus menerima harga itu, karena mereka harus segera dapat uang cash untuk membayar BBM, membeli kebutuhan, dan kembali ke dsusun mereka. Mereka tidak mungkin membawa pulang kembali hasil produksi mereka. Suatu hari orang tua dari Salappak datang membawa pinang ke penampung di desa Muntei. Pinang itu dia simpan begitu saja di depan warung si penampung, lalu dia beranjak pergi. Si penampung memanggil di bapak tua dan bertanya:

*“pinang siapa ini?”*

*“Pinang kamu.” Jawab si bapak tua.*

*“tadi aku lihat kamu yang bawa”*

*“tapi kan yang menentukan harga kamu. Jadi itu punyamu.”*

Cerita ini menunjukkan betapa lemahnya daya tawar orang hulu dalam memasarkan hasil produksi mereka.

Namun, selain persoalan transportasi dan pemasaran, persoalan lain yang menyangkut perekonomian orang Siberut, adalah tidak adanya komoditas yang secara tepat bisa dikembangkan di Siberut. Ketika di tempat lain kakao dianggap menguntungkan, maka ramai-ramai orang menanam kakao, ketika ditempat lain musim memelihara ikan, pemerintah memberikan bantuan untuk budidaya ikan, dan seterusnya.

*“Kami di sini, dibantu apa saja mau, disuruh mengajukan proposal untuk peternakan unta saja kami mau...tapi persoalannya apakah program itu cocok tidak buat kami. Harusnya benar-benar dikaji kalau mau membantu menanam jenis tanaman tertentu misalnya, apakah cocok dengan kondisi alam kita, lalu kita diajari bagaimana merawanya, menelolalnya..dan yang paling penting lagi bagaimana memasarkannya...selama tidak ada akses jalan ke sini, kami tidak mendapatkan keuntungan apa-apa..atau cuma sedikit saja dari hasil yang kami tanam..”* Demikian kata Pak Kades Muntei.

Seperti yang telah disinggung di atas, pasca pembangunan desa PMKT, orang Siberut menjadi lebih terintegrasi dengan ekonomi pasar, dan proses pertukaran (resiprositas, *gift economy*) antar uma mulai tergerus. Meskipun sebenarnya sejak zaman kolonial Belanda, mereka mulai melakukan perdagangan dengan orang Belanda, Minang, dan Cina . Pedagang asal Minang dan Cina bahkan mendapat perlindungan khusus oleh pemerintah kolonial, sebagai bagian dari upaya ‘modernisasi’ yang dilakukan pemerintah kolonial sejalan dengan kebijakan lain yaitu: penghapusan praktek pemenggalan kepala, mengukuhkan aturan lokal dengan menunjuk kepala desa, membatasi sistem hukum lokal, membangun jalan dan jalur sertapak, menstimulasi penyebaran agama (misi) dan pendidikan , dan memindahkan babi ke luar dari desa. (Bakker, 1999).

Apabila dicermati, program ‘modernisasi’ pemerintah kolonial Belanda sebenarnya mirip dengan PMKT. Kecuali, seperti yang telah disinggung di atas, pemerintah Indonesia lebih radikal dengan ‘menjungkir balikan’ dunia orang Mentawai dengan memindahkan mereka ke dalam pemukiman yang standar, berjejeran antar uma, dan terpusat. Mereka juga lebih dekat dengan toko, warung, atau pasar, telah mengalihkan ‘kerja produktif’ dengan produksi dan pertukaran barang antar uma menjadi produksi dan pertukaran dengan pedagang. Dengan diberi uang jatah hidup selama 3 tahun, menyebabkan warga yang tinggal di barasi lebih konsumtif daripada produktif.

Pada tahun 1987, ketika layanan ferry mulai berjalan secara reguler antara Padang dan Siberut, semakin meningkatkan jumlah para pedagang perantara dan

penampung hasil bumi orang Siberut. Para pedagang perantara, penampung, pemilik warung ini terutama adalah orang Minang, Nias, Batak, yang sering disebut oleh orang Siberut sebagai “sareu” yang artinya orang yang datang dari jauh. Saat ini, orang-orang ini sudah banyak menetap di Siberut, terutama di daerah Muara Siberut. Sebagian dari mereka juga berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Dominasi orang Minang sebagai PNS, guru, tenaga medis, dll, terutama terjadi ketika Kepulauan Mentawai masih dimasukan wilayah kabupaten Padang Pariaman. Menurut Hammons (2010) kehadiran orang ‘sareu’ ini terutama orang Minang juga menimbulkan perasaan ‘tereksploitasi” dan ‘mendapat perlakuan tidak adil’ . Orang Siberut kadang menyebut para pegawai negeri sipil dari Minang sebagai orang yang ‘memakan uang’ (mukom bulagat), karena penguasaan mereka terhadap proyek pembangunan di setiap desa di Siberut.



Saat ini, ketika Mentawai telah berdiri menjadi Kabupaten sendiri, para pejabat lokal mulai diisi oleh orang Mentawai sendiri. Namun para sareu, yang terdiri dari orang Minang, Batak, dan Nias masih berperan sebagai penampung hasil produksi orang mentawai, pedagang perantara, dan pemilik warung atau toko yang menjual kebutuhan orang-orang Siberut. Termasuk, sebagian dari mereka juga yang menjadi agen penyalur dan sekaligus penimbun BBM.

Peran penampung, pedagang perantara, dan pemilik warung/toko selain 'berkuasa' dalam menentukan harga, seperti yang diungkap di atas. Mereka juga mulai melakukan invasi lain dengan membeli berhektar-hektar lahan penduduk Mentawai. Pembelian tanah-tanah ini tentu saja membuat ia menjadi komoditas ekonomis, dan ikut menyumbang pada persoalan perselisihan penguasaan dan kepemilikan tanah di Mentawai.

Selain itu, karena mereka memiliki modal dan koneksi, mereka juga sering tetlibat dalam proyek-proyek pembangunan dari pemerintah sebagai kontraktor atau supplier material. Selain mengembangkan bisnis di antara kelompok etnis mereka sendiri . Salah satu orang terkaya di Siberut, Zebua, orang Nias, statusnya adalah pegawai Syahbandar. Tetapi dia tidak pernah berangkat ke kantor/pelabuhan. Dia memilih berbisnis menjadi penampung, pedagang, penjual material, kontraktor, membeli tanah warga, dan memberi modal pada orang Nias lain, seperti Bowo dan Beni Pasaribu untuk menjadi penampung dan pedagang petrantara untuk hasil bumi dan ternak orang Siberut; dari mulai pisang, kakao, dan babi.

Para penampung, pedagang perantara, dan pemilik toko ini juga mendapatkan keuntungan lebih jauh, karena di Siberut tidak ada pajak. Selain bisa menentukan harga untuk komoditas yang mereka beli, tampung, dan distribusikan ke tempat lain, mereka juga mendapat keuntungan karena setelah orang Siberut dari hulu menjual komoditas mereka pada para penampung ini, uang hasil penjualan tersebut seringkali dibelikan kebutuhan sehari-hari, rokok, maknana di warung atau toko yang dimiliki oleh para penampung ini. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan berlipat-lipat.



Kehadiran para penampung, pedagang perantara, dan pemilik toko ini, memang sejalan dengan transformasi kehidupan ekonominya orang Siberut dari pertukaran antar-uma dengan kerangka resiprositas atau ekonomi hadiah menjadi ekonomi pasar. Yang perlu dicermati proses transformasi ini memunculkan kelas baru yang berkelindan dengan relasi etnis yaitu kelas para penampung, pedagang perantara, dan pemilik toko. Kelas ini yang nampaknya mendapatkan keuntungan paling banyak dari proses transformasi ini. Sementara itu orang Siberut sendiri, alih-alih menjadi produsen yang memiliki komoditas andalan dan mempunyai nilai ekonomis untuk dijual, malah lebih menjadi 'konsumen', dari warung dan toko-toko yang dimiliki juga oleh penampung dan pedagang perantara.

Maka di luar jual beli produk kebun, hutan, atau ternak mereka, salah satu sumber ekonomi yang lain yang diharapkan oleh orang Siberut adalah 'proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti PNPM, P2DT, program pembukaan 100 hektar lahan pertanian dari departemen pertanian. Dll. Melalui proyek-proyek ini, orang Siberut bisa mendapatkan uang dengan cara bekerja sebagai pelaksana dan

pekerja proyek atau penyedia material. Maka ketika ada proyek atau program pembangunan dari pemerintah, mereka selalu terbuka, karena di sana mereka ada kesempatan mendapatkan penghasilan selain dari berkebun.

Bukan suatu kebetulan kalau ada cerita atau seloroh, jika dulu orang Siberut berpindah-pindah karena konflik atau upaya mencari tanah yang lebih produktif, maka sekarang mereka berpindah-pindah mengikuti proyek pemerintah, karena dengan demikian mereka bisa mendapatkan uang. Kesibukan mengikuti proyek pembangunan dari pemerintah kadang membuat kegiatan berkebun mereka menjadi terganggu atau kalau tidak terhenti sama sekali. Maka perkataan kepala desa Muntei bahwa ketika mereka mengurus ladang sebenarnya 'bukan bekerja tetapi sekedar mengisi waktu luang' mendapatkan gaungnya yang lain.



#### **e. Aspek Kelembagan dan Pelayanan Umum (Birokrasi, Infrastruktur; Kesehatan; Pendidikan)**

Cara lain untuk mendapatkan 'jatah' dana dan proyek pembangunan adalah membuat desa baru, atau pemekaran desa. Saat ini, terdapat berbagai upaya dari warga dan pejabat lokal (kepala desa atau kepala dusun) untuk mengajukan

pemekartan desa kepada pemerintah daerah Mentawai. Salah satu alasannya adalah agar mereka lebih bisa mendapatkan pelayanan umum dari pada sebelumnya.

Dusun Begellu, Salappak, dan Magosi yang berjauhan dengan dusun lain di Desa Muntei misalnya mencoba mengajukan permohonan untuk menjadi desa baru. Dengan demikian mereka berharap bisa diperhatikan dan mendapatkan dana pembangunan, terutama untuk membangun infrastruktur jalan, yang menurut warga di sana sangat vital untuk perkembangan ekonomi mereka.

Selain itu, Dusun Puro, yang terbentuk karena program PKMT, dan kini termasuk ke dalam bagian desa Muara Siberut juga mengajukan diri untuk menjadi satu desa baru. Warga dusun Puro yang banyak dirasa cukup untuk memenuhi syarat menjadi satu desa. Namun, upaya pengajuan pemekaran desa ini terhambat birokrasi. Karena ternyata sebagian warga dusun Puro ternyata terdaftar dalam KTP mereka sebagai warga desa Muntei, bukan sebagai warga desa Muara Siberut. Terdapat overlapping antara penduduk desa Muntei dan desa Muara Siberut. Berbagai upaya dilakukan untuk mensukseskan upaya pemekaran ini, salah satunya adalah dengan mengajukan upaya pemekaran melalui Desa Muntei. Dan ini membuat kerumitan tertentu yang sulit untuk diurai.

Kerumitan dan kesalahan birokrasi juga terjadi ketika dusun Puro mengajukan proposal permohonan menjadi desa baru, ternyata jutsru SK yang keluar adalah jutsru untuk pemekaran dusun Toktuk, yang juga bagian dari desa Muara Siberut. Aneh dan lucunya, permohonan pemekaran desa Toktuk ini hanya disampaikan melalui SMS, sementara dusuns Puro sudah mengajukan lama dengan menggunakan proposal resmi.

Selain harapan untuk mendapatkan dana untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan, melalui pemekaran desa ini warga dan pejabat lokal berharap akan mendapatkan proyek-proyek pembangunan dan pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan.

Hingga saat ini di Pulau Siberut masih hanya ada satu SMA saja. Sehingga membuat muridnya membludak. Sebagian anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA harus pergi ke Padang atau tempat lain. Dan itu membutuhkan biaya. Sehingga mereka lebih memilih pesantren atau sekolah berbasis agama dan asrama yang juga biasanya menyediakan beasiswa.

Sementara dari segi pelayanan kesehatan, persoalan keterpencilan beberapa dusun di daerah Siberut menjadi isu utama bagi warga untuk mendapatkan layanan kesehatan. Meski hampir di setiap dusun ada Pustu dan bidan, atau puskesmas keliling setiap bulannya, untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu mereka tetap harus berangkat menuju Puskesmas. Di daerah Kecamatan Siberut Selatan, Puskesmas itu berada di Muara Siberut.

Pada kasus musibah muntaber yang melanda desa Muntei dan Muara Siberut misalnya, ada beberapa korban meninggal yang berasal dari susun Salappak yang memang berada jauh di hulu. *“Beberapa orang yang meninggal di perjalanan, di atas pongpong, karena jarak terlalu jauh yang harus kita tempuh...yah..dari pada semua orang di sini mati, sebagian saja kan tidak apa-apa..”* Kata kepala dusun Salappak, penuh dengan ironi.



*“Beda dengan di Jawa, di sini penyebab orang sakit bisa macam-macam. Kalau yang disebabkan oleh roh-roh, maka kita pergi memanggil bantuan Sikerei. Kalau karena penyaki biasa kita ke dokter”* demikian menurut seorang pemuda di Puro yang sudah beberapa hari tubuhnya merasa lemas dan tidak bergairah. Sebelumnya ia pergi ke dokter di Puskesmas, dan dokter bilang bahwa ia mendapatkan gangguan di lambung. Gangguan di lambung merupakan penyakit yang paling banyak di derita di Siberut yang menurut dokter disebabkan oleh pola makan orang Siberut. Namun, sampai beberapa hari setelah diobati si sakit merasa tidak banyak perubahan. Maka ia memanggil Sikerei untuk membuat ritual penyembuhan.



Menurut beberapa informan, warga Siberut tahu mana penyakit yang bisa mereka sembuhkan dengan ramuan-ramuan obat dari daun-daunan atau tanaman lain yang ada di sekitar mereka, mana yang harus pergi ke dokter, dan mana yang harus disembuhkan melalui ritual tertentu oleh Sikerei. Pengetahuan masyarakat mengenai obat-bobatan tradisional alami juga diakui oleh banyak peneliti.



Menurut dokter di Puskesmas, layanan kesehatan yang penting bagi orang Siberut, adalah fasilitas yang menunjang gaya hidup sehat. Terutama menyangkut ketersediaan toilet keluarga dan tempat pembuangan sampah. Sebagian besar warga Siberut tidak memiliki toilet. Mereka biasanya buang air sembarang, di kebun atau di semak-semak. Wabah muntaber yang menyerang warga desa Muneti dan Muara Siberut beberapa waktu lalu juga disinyalir karena air minum mereka terkontaminasi bakteri Coli tinja. Sementara itu, di pulau Siberut tidak ada penampungan sampah akhir. Warga membuang sampah begitu saja dipinggir pantai atau di kebun, atau membakar sampah mereka.



#### **f. Struktur dan Pemanfaatan Ruang**

Apabila dicermati, saat ini pemukiman warga di desa atau dusun sudah mengikuti pola pemukiman yang dulu diperkalkan melalui program PKMT. Berbagai KK dari berbagai Uma tinggal dalam wilayah yang sama dengan rumah yang berjejeran, relatif seragam, menghadap jalan. Sementara ladang dan kandang ternak mereka terpisah agak jauh dengan perumahan mereka.



Tampaknya sedikit sekali yang masih mempertahankan struktur dan pemanfaatan ruang secara tradisional, di mana setiap Uma tinggal berjauhan, dipisahkan dengan ruang antara, yang biasanya berupa hutan. Sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pertukaran antar uma dan memitigasi konflik dan persaingan terbuka antar uma, agar tidak menjadi kekerasan.

Namun, tampaknya masih ada keterpisahan antara tempat tinggal pendatang dan warga asli Siberut. Di mana pendatang, bersama dengan toko dan warung mereka, lebih banyak tinggal di pinggiran pantai, dermaga, atau muara, sementara penduduk asli lebih masuk ke dalam bahkan, jauh ke hulu. Struktur dan pemanfaatan ruang seperti ini berpotensi untuk memperkuat segregasi antar penduduk asli dan pendatang, yang ke depan bisa menciptakan ruang konflik di antara mereka.

## **2. Analisis Isu-Isu Strategis**

### **a. Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi terkait dengan aspek-aspek diatas**

Dari uraian di atas, permasalahan pembangunan yang dihadapi yang dihadapi oleh masyarakat Siberut terutama menyangkut pembangunan ekonomi yang berkaitan erat dengan persoalan ekologi, terutama penguasaan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, yang kemudian membentuk organisasi sosial tertentu.

Persoalan konflik dan rumitnya pola kepemilikan dan penguasaan tanah harus ada jalan keluar untuk mengatasinya. Jika tidak pembangunan (terutama berhubungan dengan infrastruktur, seperti jalan) akan terhambat, bahkan bukan tidak mungkin jika proses mediasi dan mitigasi melalui 'nilai-nilai lokal' yang selama ini masih dipegang terus menerus gagal, akan memicu kekerasan dan kerusuhan.

Transformasi atau lompatan ekonomi dari ekonomi berbasis pertukaran dan hadiah (*gift economy*) antar uma atau klan, menuju ekonomi –pasar, melalui program yang ‘menjungkir balikan’ ruang dan dunia sosial orang Siberut seperti program PKMT, membuat orang Siberut ‘konsumtif’ dari pada ‘produktif’. Proses integrasi dan transformasi ekonomi ini juga melahirkan dan menguntungkan ‘kelas’ penampung, pedagang perantara, dan pemilik toko/warung yang beririsan dengan identitas etnis dan segregasi antara ‘asli’ da ‘pendatang’. Persoalan ini jika tidak diatasi akan juga berujung pada semakin terpuruknya ekonomi warga Siberut, menciptakan kesenjangan antara mereka dengan ‘pendatang’ yang semakin tajam, dan bis berujung, lagi-lagi pada konflik.

#### **b. Isu strategis**

Dengan demikian, Isu strategis yang bisa diangkat terutama adalah menyangkut pembangunan ekonomi produktif berbasis penguasaan sumber daya alam dan tanah yang tertata dengan baik dan berkeadilan.

### **3. Kondisi Ideal yang Diharapkan Orang Mentawai**

Ketika ditanya mengenai kondisi ideal yang diharapkan oleh orang Mentawai , orang-orang di Siberut selalu mengarah pada tersedianya infratraktur jalan dan transportasi yang memadai, sehingga mobiltas manusia dan barang bisa lancar, murah, dan menguntungkan. Selain itu, banyak juga yang mengharapakan fasilitas pendidikan tersedia dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sehingga SDM mereka bisa ditingkatkan.

Orang Siberut tentu akan lebih mudah membayangkan kondisi ideal dari segi kondisi material menyangkut sarana dan prasarana; terutama jalan. Tetapi, sebagaimana layaknya sebua infratraktur , jalan dan pendidikan, harus ditempatkan dalam konteks pembangunan ekonomi yang lebih produktif , berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### 4. Tawaran Strategi Pencapaian

Kondisi ideal tersebut bisa melalui strategi sebagai berikut:

- Penyelesaian persoalan dan penataan pola dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam .
- Pengembangan ekonomi produktif yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam Mentawai.
- Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi yang memadai.
- Pengembangan SDM melalui pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.



